



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
I N S P E K T O R A T

Jln. Lagadi - Tondasi Desa Lapolea Kec. Barangka

LAPORAN HASIL EVALUASI

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022**



NOMOR : 700.1.2.1/08 /II/2023
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
I N S P E K T O R A T

Jl. Poros Lagadi Tondasi Desa Lapolea Kecamatan Barangka

Laworo, 21 Februari 2023

Nomor : 700-1-2-1/08/I/2023
Lampiran : Satu set
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Tahun 2022

Yth. Inspektur Kabupaten Muna Barat

di-
Laworo

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Inspektur Nomor 700/03.a/INSP/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat serta Surat Tugas Inspektorat Kabupaten Muna Barat Nomor 800.1.11.1/17/I/INSP/2023 tanggal 24 Januari 2023 kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Muna Barat tahun 2022, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP OPD.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja OPD.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah daerah.

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:
 - a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja;
 - d. Evaluasi Kinerja, dan
 - e. Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dokumen terkait lainnya. Sehingga evaluasi yang kami lakukan tidak terfokus kepada ada atau tidak adanya dokumen LAKIP, namun terfokus kepada berjalannya sistem AKIP pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mulai dari tahap perencanaan sampai ke pelaporan.

3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100.

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>85-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>75-85	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabilitas kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	<60-70	Baik , Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan

5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerja cukup baik taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30-50	Kurang , sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagai perubahan yang sangat mendasar.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Muna Barat memperoleh nilai sebesar 72,13 atau mendapat kategori **“Sangat Baik”**.

4. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Muna Barat, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a.	Perencanaan Kinerja;	30%	24,61
b.	Pengukuran Kinerja	25%	15,63
c.	Pelaporan Kinerja	15%	10,61
d.	Evaluasi Kinerja	10%	5,79
e.	Capaian Kinerja	20%	15,50
Jumlah		100%	72,13

A. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Muna Barat menunjukkan capaian kinerja dengan nilai **24,61** dari nilai maksimum **30,00**. Rincian hasil evaluasi terhadap unsur-unsur perencanaan kinerja sebagai berikut:

1) Perencanaan Strategis

Hasil evaluasi atas komponen "**Perencanaan Strategis**" menunjukkan nilai sebesar **8,51** dari nilai maksimal **10,00**, dengan uraian sebagai berikut:

a) Pemenuhan Renstra

Hasil evaluasi atas sub komponen "**Pemenuhan Renstra**" menunjukkan nilai **1,89** dari nilai maksimum **2,00**. Penilaian dilakukan atas keberadaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat 2017-2022, dokumen Renstra OPD 2017-2022 dan Renstra Perubahan (Revisi), serta atribut utama yang harus ada pada dokumen tersebut, yaitu:

- Tujuan, Indikator Tujuan, Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan;
- Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran;
- Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Tahunan; serta
- Publikasi atas Renstra OPD.

Secara umum Pemenuhan Renstra pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dipenuhi dengan menyusun Renstra Tahun 2017 – 2022 yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target jangka menengah. Namun, tujuan dan sasaran masih memuat indikator yang sama.

b. Kualitas Renstra

Hasil evaluasi atas sub komponen "**Kualitas Renstra**" juga

menunjukkan nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal yaitu **5,00**.

c. Implementasi Renstra

Hasil evaluasi atas sub komponen **“Implementasi Renstra”** menunjukkan nilai sebesar **2,25** dari nilai maksimal **3,00**. Nilai ini diperoleh karena target jangka menengah dalam Renstra belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.

2) Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Hasil evaluasi atas komponen **“Perencanaan Kinerja Tahunan”** menunjukkan nilai sebesar **16,10** dari nilai maksimal **20,00**, dengan uraian sebagai berikut:

a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Hasil evaluasi atas sub komponen **“Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan”** menunjukkan nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimum **4,00**. Capaian yang cukup tinggi tersebut dikarenakan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 telah disusun, Perjanjian Kinerja (PK) telah dipublikasikan secara terbuka melalui Website <http://dpmpstsp.munabarat.go.id>.

b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Hasil evaluasi atas sub komponen **“Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan”** juga menunjukkan nilai **8,75** dari nilai maksimal yaitu **10,00**. Capaian yang cukup tinggi tersebut karena rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.

c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Hasil evaluasi atas sub komponen **“Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan”** menunjukkan nilai sebesar **3,60** dari nilai maksimal **6,00**. Faktor penyebab kurang maksimalnya nilai Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan yaitu Rencana Aksi

belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

B. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen **“Pengukuran Kinerja”** menunjukkan nilai sebesar **15,63** dari nilai maksimal **25,00**, dengan uraian sebagai berikut :

1) Pemenuhan Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub komponen **“Pemenuhan Pengukuran”** menunjukkan nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal **5,00**. Capaian tersebut tinggi karena pada dokumen RKT PTSP telah memuat indikator kinerja utama (IKU) dan telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya serta telah memiliki SOP untuk mekanisme pengumpulan data kinerja.

2) Kualitas Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub komponen **“Kualitas Pengukuran”** menunjukkan nilai sebesar **8,13** dari nilai maksimal **12,50**. Rendahnya capaian tersebut karena Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

3) Implementasi Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub komponen **“Implementasi Pengukuran”** menunjukkan nilai sebesar **3,13** dari nilai maksimal **7,50**. Rendahnya capaian tersebut dikarenakan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment* serta Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen **“Pelaporan Kinerja”** menunjukkan nilai sebesar **10,61** dari nilai maksimal **15,00**,

dengan uraian sebagai berikut:

1) Pemenuhan Pelaporan

Hasil evaluasi atas sub komponen "**Pemenuhan Pelaporan**" menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal **3,00**.

Maksimalnya nilai pada sub komponen ini dikarenakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyampaikan LAKIP tahun 2021 secara tepat waktu.

2) Penyajian Informasi Kinerja

Hasil evaluasi atas sub komponen "**Penyajian Informasi Kinerja**" menunjukkan nilai sebesar **4,91** dari nilai maksimal **7,50**. Penyebab rendahnya nilai pada sub komponen ini disebabkan karena Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya sehingga Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Hasil evaluasi atas sub komponen "**Pemanfaatan Informasi Kinerja**" menunjukkan nilai sebesar **2,70** dari nilai maksimal **4,50**. Nilai ini belum maksimal dikarenakan Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja sehingga belum dapat digunakan untuk penilaian kinerja.

D. Evaluasi Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen "**Evaluasi Kinerja**" menunjukkan nilai sebesar **5,79** dari nilai maksimal **10,00**, dengan uraian sebagai berikut:

1) Pemenuhan Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub komponen "**Pemenuhan Evaluasi**" menunjukkan nilai sebesar **1,71** dari nilai maksimal **2,00** dengan

uraian sebagai berikut:

- Evaluasi program telah dilakukan.
- Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan
- Hasil evaluasi belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2) Kualitas Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub komponen **"Kualitas Evaluasi"** menunjukkan nilai sebesar **0,00** dari nilai maksimal **5,00**, dengan uraian sebagai berikut:

- Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan, akan tetapi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
- Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.
- Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
- Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
- Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan setiap periode

3) Pemanfaatan Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub komponen **"Pemanfaatan Evaluasi"** menunjukkan nilai sebesar **1,50** dari nilai maksimal **3,00**. Rendahnya pemanfaatan evaluasi disebabkan karena Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Hasil evaluasi atas komponen **"Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi"** menunjukkan nilai sebesar **15,50** dari nilai maksimal **20,00**, dengan uraian sebagai berikut :

1) Kinerja yang Dilaporkan (*Output*)

Hasil evaluasi atas sub komponen "**Kinerja yang Dilaporkan (*Output*)**" menunjukkan nilai sebesar **5,50** dari nilai maksimal **7,50**. Capaian kinerja tersebut didapat berdasarkan evaluasi terhadap Pencapaian Target kinerja, Pencapaian kinerja *output* tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta Keandalan informasi mengenai capaian kinerja *output* yang masing-masing bernilai baik.

2) Kinerja Yang Dilaporkan (*Outcome*)

Hasil evaluasi atas sub komponen "**Kinerja yang Dilaporkan (*Outcome*)**" menunjukkan nilai sebesar **10,00** dari nilai maksimal **12,50**. Capaian kinerja tersebut didapat berdasarkan evaluasi terhadap:

- Pencapaian Target kinerja *outcome*;
- Pencapaian Kinerja *outcome* tahun berjalan dibandingkan kinerja *outcome* tahun sebelumnya;
- Keandalan Informasi capaian kinerja *outcome*.

(Dalam poin A s/d E menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi)

5. Terhadap permasalahan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Muna Barat, agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:
- a. Melakukan monitoring terhadap pencapaian Target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan.
 - b. Untuk lebih meningkatkan kualitas Pengukuran Kinerja agar dalam melakukan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi.
 - c. Melakukan monitoring/evaluasi atas program atau implementasi Rencana Aksi dilengkapi dengan rekomendasi untuk menjadi acuan perbaikan di masa yang akan datang.

- d. Meningkatkan pemanfaatan Laporan kinerja secara optimal untuk perbaikan perencanaan, program/kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
- e. Melakukan tindaklanjut atas hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.
- f. Menindaklanjuti hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini. Kami menghargai upaya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Inspektur Kabupaten Muna Barat



Agustania Sujono, S.P., MM
NIP. 19680802 198903 1 009

TembusandisampaikanKepada:

1. Yth. Bupati Muna Barat (Sebagai Laporan) di Laworo
2. Kepala PTSP
3. Kepala Bagian Ortala
4. PTSP Kabupaten Muna Barat
5. Arsip